

ANALISIS TRANSPARANSI PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN BERBASIS E-GOVERNMENT

¹Jauza Purwanurhadi, ²Fajar Syaiful Akbar

¹²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

¹jpurwanurhadi@gmail.com, ²fajarsa.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the transparency of information on the East Java local government website, because in East Java Province the percentage of e-government implementation in the availability of information on the official local government website is still lacking. This study uses a qualitative method. The results of the analysis of this study that the application of UU KIP and Information Commission Regulation No. 1 of 2010 concerning Standards for Public Information Services have not been fully implemented for Regencies/Cities in East Java Province. In accordance with Government Regulation no. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and the Public Information Disclosure Act no. 14 of 2008, only 14 regencies/cities or 37% have implemented on their website.

Keywords:: Transparency, Financial and Non-Financial Information, E-Government

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis transparansi informasi pada situs web pemerintah daerah Jawa Timur, karena pada Provinsi Jawa Timur persentase penerapan e-government dalam ketersediaan informasi pada situs web resmi pemerintah daerah masih dirasa sangat kurang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa penerapan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik belum diterapkan secara menyeluruh terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hanya terdapat sebagian yang telah menerapkan keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yaitu dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur hanya 14 Kabupaten/Kota atau 37% saja yang telah menerapkan keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangannya di website milik pemerintah kabupaten/kota.

Kata Kunci: Transparansi, Informasi Keuangan dan Non-Keuangan, E-Government.

Submitted: 23 Maret 2023

Revised: 05 Mei 2023

Accepted: 12 Mei 2023

Email korespondensi : jpurwanurhadi@gmail.com

PENDAHULUAN

Transparansi merupakan proses keterbukaan yang harus dilakukan pemerintah untuk menyampaikan aktivitas penyelenggaraan keuangan negara kepada rakyat dalam memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan ketersediaan informasi yang diakses dengan mudah untuk mengoperasikan informasi publik yang berada di website (Medina, 2012). Transparansi dan akuntabilitas menjadi topik sorotan di tengah masyarakat. Dewasa ini masyarakat memiliki harapan agar pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel. Masyarakat tidak menginginkan tindakan korupsi terjadi di dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan tindakan korupsi akan merugikan keuangan negara yang memberikan dampak terhambatnya pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Harapannya dengan dilakukannya transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah, Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggung jawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu juga tindakan korupsi akan menguras anggaran APBD dan APBN yang sumbernya berasal dari penerimaan pajak masyarakat, dimana harapannya pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadikan masyarakat sejahtera. Dengan semakin besarnya tuntutan terhadap pengelolaan keuangan yang tepat maka pemerintah perlu menerapkan prinsip transparan dan akuntabel agar tindakan korupsi dapat diminimalisir (Zeyn, 2011).

Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai *stakeholder* yang turut berkepentingan dalam proses penggunaan anggaran pemerintah, oleh sebab itu penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori legitimasi dan teori keagenan guna menjelaskan hubungan antara masyarakat terhadap pemerintah terkait kebutuhan transparansi informasi laporan keuangan dan non-keuangan pemerintah, serta menjadi dasar untuk mendukung argumen tersebut.

Teori legitimasi dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pemerintah ingin mendapatkan pengakuan legitimasi dari para *stakeholder*. Oleh sebab itu pemerintah perlu melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar dan keinginan *stakeholder* berupa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Adiputra et al., 2018). Legitimasi kekuasaan pemerintah yang diberikan oleh masyarakat juga didukung oleh nilai-nilai Pancasila mengenai asas demokrasi yang menjadi pilar utama dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan

berdasarkan hasil keputusan musyawarah. Resikonya apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran maka dapat berakibat pada permasalahan sosial.

Teori lain yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu teori agensi. Pemerintah daerah sebagai agen yang diberikan wewenang oleh masyarakat, perlu memenuhi keinginan masyarakat (Adiputra et al, 2018). Teori keagenan ini berhubungan dengan masyarakat selaku prinsipal yang dapat memberikan amanat kepada pemerintah selaku agen untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Istikomah, 2017). Sesuai dengan teori agensi yang membahas terkait hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam konsep pemikiran teori agensi, prinsipal memberikan amanah kepada agen untuk melakukan sebuah tugas untuk kepentingan prinsipal, dalam hal ini termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Jensen, 1976).

Didasarkan pada jumlah anggaran APBD dan APBN yang dikelola oleh pemerintah, maka timbul tuntutan masyarakat agar pemerintah melaporkan semua aktivitasnya. Dengan demikian masyarakat dapat mengidentifikasi kinerja pemerintah apakah sudah menjalankan sesuai dengan prosedurnya atau tidak, dan ada atau tidaknya terjadi asimetri informasi. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan serta dituntut untuk mempermudah akses yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut.

Di Indonesia, upaya penggunaan *website* oleh Pemda dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 berisikan pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia yang diperjelas dengan intruksi Presiden No.3 tahun 2003, yang saya ambil dari Inpres No.3 tahun 2003. Dalam mewajibkan instansi baik pemerintahan pusat maupun daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi publik bertujuan agar efektivitas dan efisiensi atas kinerja organisasi secara keseluruhan dapat lebih ditingkatkan. Dengan kecanggihan teknologi informasi yang sekarang sangat pesat potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi banyak pihak untuk mengakses, mengelola,

dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Dalam hal ini situs web sangat banyak membantu dalam memberikan kemudahan pelayanan dan dalam mengoperasikan informasi, komunikasi dan transaksi masyarakat dengan pemerintah melalui via internet mengingat masyarakat sulit dipisahkan dari alat komunikasi (Prasetya, 2017).

Dengan kehadiran situs web resmi Pemda, hal tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan mendorong pelayanan publik bersama media transparansi informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai pengawasan sehingga membuat pemerintah tidak memiliki alasan untuk menutupi informasi yang berkaitan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama terbukanya pendataan keuangan pemerintahan daerah yang merupakan informasi wajib secara berkala, informasi wajib secara serta merta, dan informasi yang tersedia konsisten bagi kepentingan masyarakat.

Namun permasalahannya masih maraknya kasus korupsi yang terjadi terutama pada lingkungan pemerintah daerah dan kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga hal ini bertentangan terhadap ekspektasi dan harapan masyarakat atas sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Salah satu contohnya adalah kasus tertangkapnya 15 Kepala Daerah di Jawa Timur yang ditangkap karena terlibat kasus korupsi. Dimana yang terbaru adalah tertangkapnya bupati Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari pada 30 Agustus 2021 kemarin menambah panjang daftar kepala daerah di Jawa Timur yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Belarminus, 2021).

Dari kasus tersebut dapat diamati bahwa masih kurangnya tingkat transparansi dan akuntabilitas yang membuat sejumlah kasus tersebut yang melibatkan sejumlah kepala daerah di Jawa Timur masih leluasa untuk melakukan tindak korupsi. Oleh sebab itu pemerintah perlu meningkatkan prinsip transparan dan akuntabel pada pemerintah pusat maupun daerah dengan tujuan meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana korupsi yang sama.

Transparansi informasi laporan kegiatan pemerintahan di suatu daerah sangat penting mengingat banyaknya korupsi yang terjadi oleh oknum pemerintahan sendiri. Maka dari itu setiap daerah harus memberikan masyarakat kemudahan dalam mengakses informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat. Kejadian tersebut diujudkannya melalui pembuatan situs resmi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Namun pada kenyataannya

masih banyak pemerintah daerah/kota di Jawa Timur yang masih belum membuka informasi kinerja laporan keuangan dan non-keuangannya pada website mereka, sehingga akses masyarakat terhadap informasi tersebut masih sangat minim.

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis transparansi informasi pada situs web pemerintah daerah Jawa Timur, karena pada Provinsi Jawa Timur persentase penerapan *e-government* dalam ketersediaan informasi pada situs web resmi pemerintah daerah masih dirasa sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan penulis lebih memfokuskan penelitian pada situs web pemerintah yang resmi terdaftar dalam *e-government* provinsi Jawa Timur yang sudah atau tidak mencantumkan informasi publik dalam situs *e-government* tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif serta menjabarkan secara deskriptif. Alasan peneliti untuk meneliti tentang permasalahan hal tersebut adalah masih minimnya ketersediaan informasi pada website kabupaten dan kota pada provinsi Jawa Timur. Adanya kesangkutpautan pada pasal 7 Undang-Undang No.14 tahun 2008 yaitu badan publik wajib menyediakan, menerbitkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, sehingga membuat pemerintah atau badan publik tidak memiliki alasan untuk menutup-nutupi informasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Memiliki kesangkutpautan Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara mewajibkan pemerintah pusat dan pemda untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji bagaimana eksistensi situs web pemerintah daerah Jawa Timur dan implementasi keterbukaan informasi publik yang tersedia pada situs web resmi pemerintah daerah Jawa Timur.

Ruang lingkup penelitian ini adalah *website* pemerintah yang resmi terdaftar dalam *e-government* provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada situs web pemerintah yang resmi terdaftar dalam *e-government* provinsi Jawa Timur yang sudah atau tidak mencantumkan informasi publik dalam situs *e-government* tersebut. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 38 situs web pemerintah di provinsi Jawa Timur. Penelitian

ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari informasi-informasi yang ada pada situs web resmi pemerintah daerah Jawa Timur dan informasi lain yang mendukung. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Penelitian laporan ini mengawali dengan kegiatan observasi. Dengan maksud mengidentifikasi permasalahan yang terjadi setelah diperbolehkan mengadakan penelitian kemudian melakukan survey yang dimana guna mengumpulkan data nantinya ditindak lanjuti saat melakukan penelitian serta menganalisis data dengan teknik analisis Content Analysis dan akhir disusun dari kesimpulan yang didapat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekilas Tentang *E-Government* Jawa Timur

Dalam perkembangan *e-government* di Indonesia pada tahun 2003, Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Inpres yaitu Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2003. Inpres ini memuat Strategi Pengembangan *E-government* yang juga dilengkapi dengan berbagai pedoman *e-government* seperti: Panduan Pengembangan Infrastruktur Portal Pemerintah; Pedoman Pengelolaan Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah; Pedoman Penatausahaan Website Pemerintah Daerah; dan lain-lain. *E-government* Jatim berisi materi terkait profil kondisi Provinsi Jatim berupa: Sekilas Jatim, Visi dan Misi Jatim, Informasi Penting, Pelayanan Publik dan tertuang tentang Jatim Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang transparan dan proporsional dalam sebuah website adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 yang dapat diakses melalui link bappeda.jatimprov.go.id/ di sub bagian dokumen perencanaan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang untuk jangka waktu 20 tahun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. sistem perencanaan pembangunan yang memiliki ciri khas tersendiri yang dapat dilihat dan diakses melalui link berikut:

http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wpcontent/uploads/dokren/rpjpd_jatim_2005_2025.

2. Periodisasi pelaksanaan RPJPD Provinsi dibagi menjadi empat tahap, yaitu:
 - 1) Tahap Pertama (2005-2009)
 - 2) Tahap Kedua (2010-2014)
 - 3) Tahap Ketiga (2015-2019)
 - 4) Tahap Keempat (2020-2025)

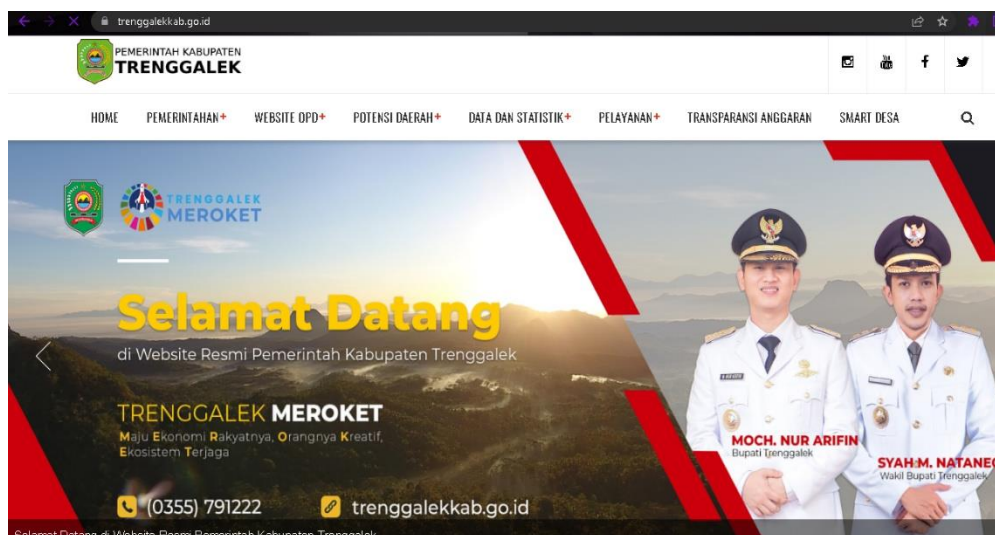
Deskripsi Informasi Pada Website Pemerintah di Jawa Timur

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibukota Jawa Timur terletak di Surabaya. Luas wilayahnya 48.033 km², dan jumlah penduduknya 41.140.000 jiwa (2022). Jawa Timur memiliki populasi kedua terbesar di Indonesia. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali (Provinsi Bali) di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Secara administratif, Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki kabupaten/kota terbanyak kedua di Indonesia. Jawa Timur memiliki peran yang cukup signifikan dalam perekonomian yang cukup tinggi terutama pada sektor industri perdagangan dan pariwisata yang sangat kompleks yaitu sebesar 80% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nasional.

Contoh Tampilan Website di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur



Gambar 1. Tampilan Awal Website Kabupaten Madiun
Sumber : Website resmi Pemerintahan Daerah



Gambar 2. Tampilan Awal Website Kabupaten Trenggalek
Sumber : Website resmi Pemerintahan Daerah



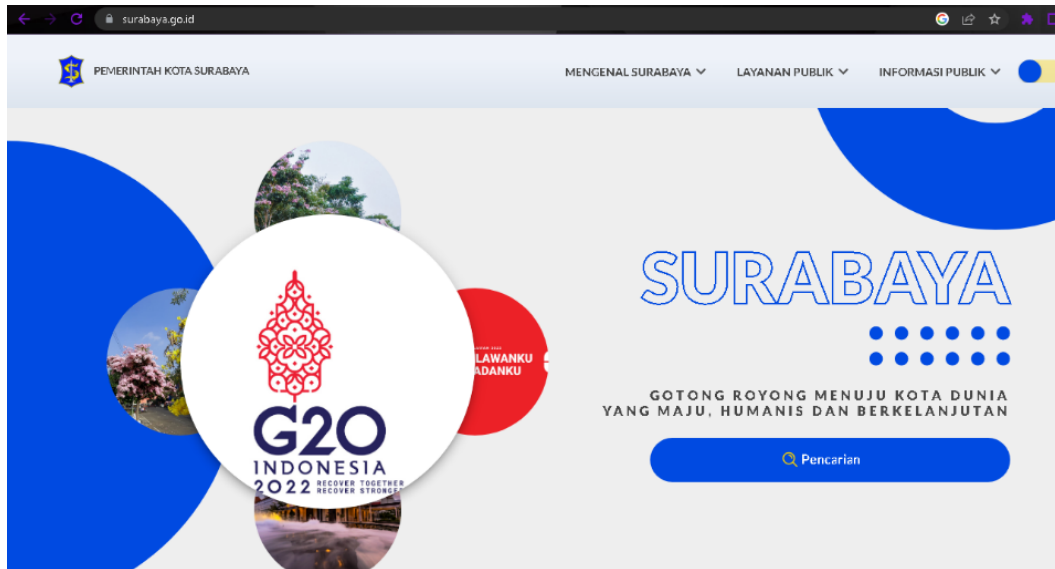
Gambar 3. Tampilan Awal Website Kabupaten Pasuruan

Sumber : Website resmi Pemerintahan Daerah



Gambar 4. Tampilan Awal Website Kota Blitar

Sumber : Website resmi Pemerintahan Daerah



Gambar 5. Tampilan Awal Website Kota Surabaya

Sumber : Website resmi Pemerintahan Daerah







Contoh Tampilan Informasi Keuangan dan Non-Keuangan pada Website di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur



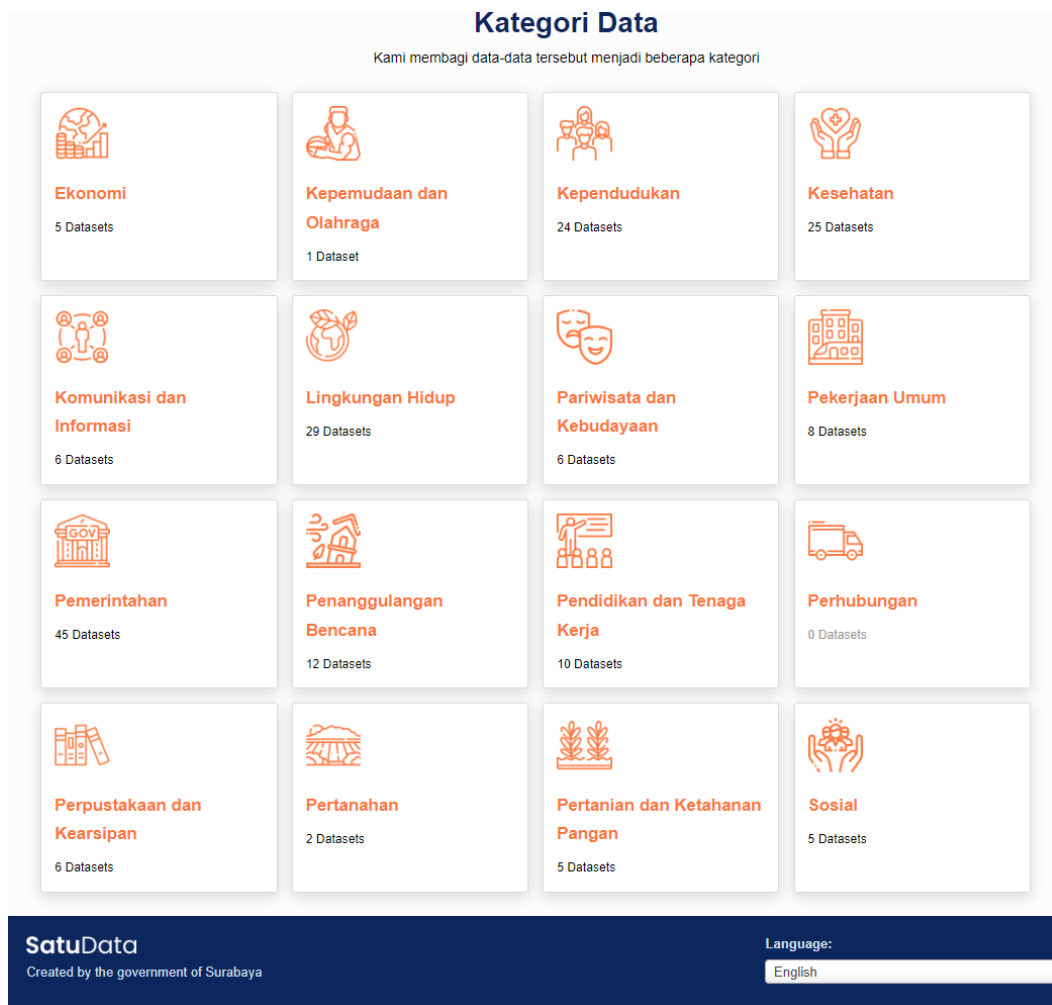
LAPORAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022

Home / LAPORAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022

Display downloads per page Search:

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Download
 Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD TA 2022 11 downloads	17 November 2022	DOWNLOAD
 Informasi Perda tentang Perubahan APBD TA 2022 4 downloads	17 November 2022	DOWNLOAD
 Informasi Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 0 download	17 November 2022	DOWNLOAD
 Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 6 downloads	9 November 2022	DOWNLOAD
 Ringkasan RKA SKPD Perubahan APBD 35 downloads	23 September 2022	DOWNLOAD
 Perda Pertanggung Jawaban APBD TA 2021 15 downloads	22 September 2022	DOWNLOAD

Gambar 6. Tampilan Informasi Keuangan pada Website Pemerintah Daerah
Sumber : Website resmi Pemerintahan Daerah



Gambar 7. Tampilan Informasi Non-Kuangan pada Website Pemerintah Daerah

Sumber : Website resmi Pemerintahan Daerah

Pembahasan Informasi Keuangan dan Non-Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Di Indonesia, upaya penggunaan *website* oleh Pemda dimulai dengan terbitnya instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 berisikan pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia yang diperjelas dengan intruksi Presiden No.3 tahun 2003, yang saya ambil dari Inpres No.3 tahun 2003. Dalam mewajibkan instansi baik pemerintahan pusat maupun daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam organisasi publik bertujuan agar efektivitas dan efisiensi atas kinerja organisasi secara keseluruhan dapat lebih ditingkatkan.

Dengan kecanggihan teknologi informasi yang sekarang sangat pesat potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi banyak pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Dalam hal ini situs web sangat banyak membantu dalam memberikan kemudahan pelayanan dan dalam mengoperasikan informasi, komunikasi dan transaksi masyarakat dengan pemerintah melalui via internet mengingat masyarakat sulit dipisahkan dari alat komunikasi (Prasetya, 2017).

Dengan kehadiran situs web resmi Pemda, hal tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan mendorong pelayanan publik bersama media transparansi informasi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai pengawasan sehingga membuat pemerintah tidak memiliki alasan untuk menutupi informasi yang berkaitan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama terbukanya pendataan keuangan pemerintahan daerah yang merupakan informasi wajib secara berkala, informasi wajib secara serta merta, dan informasi yang tersedia konsisten bagi kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang transparansi informasi publik yang sudah tertera, berikut pembahasan mengenai informasi yang telah diperoleh peneliti saat melakukan penelitian pada *website* kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Penerapan transparansi keuangan yang menggunakan situs web resmi pemerintah di setiap kabupaten dan kota ada 14 Kabupaten/Kota saja yang telah menyajikan informasi keuangan, sehingga masih banyak Kabupaten/Kota yang masih belum atau tidak sepenuhnya menerapkan transparansi informasi.

Dari data informasi tabel *Web E-Government* provinsi Jawa Timur Tahun 2022 hanya 14 Kabupaten/Kota yang telah menyajikan informasi keuangan baik berupa APBD, PDRB, LRA, dll. Sebagai wujud transparansi dalam pemerintahan yang baik, yaitu: Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Surabaya.

Sementara masih terdapat 24 Kabupaten/Kota yang masih belum menyajikan informasi keuangan, Namun fenomena yang terjadi di Jawa Timur dari segi tampilan saat diakses pada *website* beberapa Kabupaten/Kota terkesan rumit dan letak pendataan laporan keuangan

tersembunyi serta banyak *error sistem* saat dibuka. Adapun banyak *website* tidak konsisten dalam penyebaran informasi keuangan pada *website* pemerintahan daerah sesuai waktu seperti tahun-tahun sebelumnya, lalu tidak semua situs web tersebut dikelola dengan baik dan menjalankan transparansi informasi. Hal tersebut juga dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia dalam mengupdate baik website maupun informasi yang disajikan.

Berdasarkan penelitian yang sesuai dengan UU KIP dan peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang telah dilakukan pada *website* pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur terkait informasi keuangan dan anggaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang laporan realisasi anggaran sebanyak 37% atau 14 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Surabaya.

2. Neraca

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang neraca sebanyak 21% atau 8 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik.

3. Laporan Arus Kas

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang laporan arus kas sebanyak 26% atau 10 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik.

4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang laporan perubahan saldo anggaran lebih hanya 5% atau 2 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Trenggalek.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang laporan perubahan ekuitas hanya 5% atau 2 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Trenggalek.

6. Laporan Operasional

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang laporan operasional hanya 5% atau 2 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kabupaten Madiun dan Kabupaten Trenggalek.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang catatan atas laporan keuangan sebanyak 8% atau 3 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan penelitian yang sesuai dengan UU KIP dan peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang telah dilakukan pada *website* pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur terkait informasi non-keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Daftar Informasi Publik

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang daftar informasi publik hanya sebanyak 37% atau 14 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota

Surabaya.

2. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan Publik

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan publik hanya sebanyak 8% atau hanya 3 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kota Blitar, Kota Malang dan Kota Surabaya, sedangkan kabupaten/kota lainnya belum menyediakan informasi tersebut.

3. Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Kerjasama

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang Organisasi, administrasi, kepegawaian dan kerjasama hanya sebanyak 10% atau hanya 4 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kota Surabaya, sedangkan kabupaten/kota lainnya belum menyediakan informasi tersebut.

4. Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga hanya sebanyak 8% atau hanya 3 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kota Blitar, Kota Malang dan Kota Surabaya, sedangkan kabupaten/kota lainnya belum menyediakan informasi tersebut.

5. Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Publik

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang surat menyurat pimpinan atau pejabat Publik hanya sebanyak 3% atau hanya 1 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu hanya Kota Surabaya, sedangkan kabupaten/kota lainnya belum menyediakan informasi tersebut.

6. Data Perbendaharaan atau Inventaris

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang data perbendaharaan atau inventaris hanya sebanyak 5% atau hanya 2 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Kota Malang dan Kota Surabaya, sedangkan kabupaten/kota lainnya

belum menyediakan informasi tersebut.

7. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Publik

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja badan publik hanya sebanyak 10% atau hanya 4 dari 38 Kabupaten/Kota yaitu Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kota Surabaya, sedangkan kabupaten/kota lainnya belum menyediakan informasi tersebut.

8. Agenda Kerja Pimpinan Badan Publik

Kabupaten/Kota yang telah menyediakan informasi tentang agenda kerja pimpinan badan publik hanya sebanyak 13% atau hanya 5 dari 38 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Madiun, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kota Surabaya, sedangkan kabupaten/kota lainnya belum menyediakan informasi tersebut.

KESIMPULAN

Hasil analisis dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa penerapan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik belum diterapkan secara menyeluruh terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hanya terdapat beberapa Kabupaten dan Kota yang sudah menerapkan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan dengan baik sesuai dengan pembahasan sebelumnya, dan tidak semua kabupaten/kota tersebut menerapkan keduanya dengan baik karena umumnya hanya menerapkan sebagian saja dan masih banyak yang terkendala aksesibilitas terhadap informasi tersebut.

Informasi Publik terkait kinerja keuangan dan anggaran daerah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur belum sepenuhnya diterapkan sesuai kategori yang ada diantaranya yang paling banyak tidak menerapkan kategorinya yaitu tentang informasi tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, informasi tentang Laporan Perubahan Ekuitas, informasi tentang Laporan Operasional dan informasi tentang Catatan Atas Laporan Keuangan.

Informasi Publik terkait non-keuangan yang wajib dilaporkan oleh pemerintah kabupaten/kota memiliki delapan kategori pelaporan dan dalam 38 website Kabupaten/Kota masih sedikit yang sudah menerapkan atau menyediakan informasi non-keuangan tersebut antara lain kategori tentang Informasi Tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan Publik, Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga, Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Publik dan Data Perbendaharaan atau Inventaris yang nilai persentase keterbukaan informasi non-keuangan tersebut hanya di bawah 10% Kabupaten/Kota yang telah tersedia pada website.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa implementasi keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur belum maksimal. Hanya terdapat sebagian yang telah menerapkan keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yaitu dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur hanya 14 Kabupaten/Kota atau 37% saja yang telah menerapkan keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangannya di website milik pemerintah kabupaten/kota.

Saran

Berdasarkan penerapan yang penulis dapatkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran pada pengelola situs web maupun pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur untuk menerapkan prinsip good governance secara menyeluruh sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai penyelenggaraan negara dengan asas-asas good governance dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, serta pengelola situs web dapat lebih memudahkan pengunjung yang akan mencari informasi dengan menyertakan link pada seluruh sub menu yang telah tersedia pada website sehingga kedepannya dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara dan meningkatkan aksesibilitas terkait keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan pada website pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Keterbatasan Penelitian

Saat melakukan penelitian, peneliti sering mengalami kesulitan dalam pencarian informasi keuangan pada *website* Kabupaten/Kota karena tidak disediakan secara serta merta melainkan harus menelusuri lebih jauh ke *website* bagian transparansi anggaran Kabupaten/Kota tersebut, karena masih banyak *website* pemerintahan kabupaten/kota yang masih memisahkan informasi anggaran keuangan pada laman web yang berbeda. Selain itu juga masih banyak *website* pemerintahan kabupaten/kota yang memiliki menu utama dan sub menu yang membingungkan dan tidak informatif sehingga menyebabkan pencarian data menjadi semakin sulit. Kemudian juga masih terdapat beberapa *website* pemerintahan kabupaten/kota yang tidak dapat diakses secara penuh dan menampilkan tampilan web yang rusak atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Boedi Soesetyo, Kasiyanto, 2013. Kebijakan Sistem Pemerintahan E-Government di Kabupaten Tulungagung, Vol. 1, No. 1. Hal 2-9
- Admin. (2017, 7 November). Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Telah diakses tanggal 11 Maret 2019 pada website: (<https://idtesis.com/pengertian-anggaran-pendapatan/>).
- Admin KeuLSM. (2013, 25 Februari). 10 Prinsip *Good Governance*. Telah diakses tanggal 5 Februari 2019 pada website: (<http://keuanganlsm.com/10-prinsip-good-governance/>).
- Administrasi Pemerintah. (2015, 17 Februari). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Telah diakses pada tanggal 14 Maret 2019 pada website: (<http://pemerintah.net/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd/>)
- Adiwirya M. Firdiansyah, I Putu Sudana, 2015. Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Hal 162-164.
- Anggraeni, Dian T. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 3 No. 3.
- Ayu Isti. 2022. Makanan Khas Pacitan Populer dan Lengkap, dari Gurih hingga Manis Legit. Telah diakses pada tanggal 05 Februari 2019 pada website: (<https://www.merdeka.com/jateng/makanan-khas-pacitan-populer-sajian-gurih-hingga-manis-legit-klm.html>)

- Bambang Supriyanto, 2015. Pacitan Kota Batu Akik, Ini Buktinya. Telah diakses tanggal 10 Februari 2019 pada website: (<https://kabar24.bisnis.com/read/20150624/78/446770/pacitan-kota-batu-akik-ini-buktinya>)
- Cooper, Donald R. dan Schindler, Pamela S. 2006. Business Research Methods, 9th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin
- Manik Tumpal. 2019. Analisis Aspek Sistem Informasi Akuntansi Penenaan Pajak Aktivitas Transaksi Ecommers dan Bisnis Online dalam Mengendalikan Kewajiban Wajib Pajak Sebagai Self Assasment System Melalui Sistem Jaringan Internet.
- Febriana F. Albugis, 2016. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 3
- Humas Protokol Kab.Buleleng. (2017, 22 Mei). Pengertian, Prinsip Dan Penerapan *Good Governance* di Indonesia. Telah diakses pada tanggal 05 Februari 2019 pada website: (<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-danpenerapan-good-governance-di-indonesia-99>)
- Momuat Chandra, P. I. 2016, Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Transaransi Dan Akuntabilitas (Studi Pada Kabupaten Minahasa Tenggara), Jurnal EMBA, Vol.4, No.1. Hal 1520-1522.
- Ni Kadek Alit Apriliani, Edy Sujana, Gede Adi Yuniarta, 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung), e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, No. 1. Hal 2-3.
- Rangga Eka Prasetya, 2017. Analisis Transparansi Penyajian informasi Keuangan Berbasis E-government Pada Website Pemerintah daerah Jawa Timur.
- Taligan, E. P. Antonius, Lastria Nurtanzila. (2013, Mei). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, Vol. 17, No.1. Hal 30-33.
- Utomo, E. (2015, 8 Agustus). Pengertian dan Prinsip Keterbukaan. Telah diakses tanggal 08 Februari 2019 pada website: (<http://pkn-ips.blogspot.com/2015/08/pengertian-dan-prinsip-keterbukaan.html>)
- Yanwariyanidwi. (2015, 15 Desember). Pengertian, Prinsip dan Penerapan *Good Governance* di Indonesia. Telah diakses tanggal 10 Februari 2019 pada website: (<https://yanwariyanidwi.wordpress.com/2015/12/15/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia/>).